



Strategi Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Kebijakan Pandemi Covid-19 Di Tangerang Selatan

Andreas Utama Putra¹, Lubna Salsabila², Sahat Sianturi³

^{1,2,3} Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 1 Februari 2022

Revisi Akhir: 20 Februari 2022

Diterbitkan Online: 28 Februari 2022

KATA KUNCI

Government Strategy, Local Government, South Tangerang

KORESPONDENSI

E-mail:

andreanutama@gmail.com

lubna.salsa@gmail.com

A B S T R A C T

The goal of this research is to look into the role of local governments in lobbying for and carrying out any federal policy or program. Concerning the flow of communication from the government to the community, the research that was undertaken explored in great detail the communication that occurred between regional government workers. The descriptive method with a qualitative approach was employed as the research methodology in this study. Furthermore, Edward III's theory was used to investigate the stages of communication and their role in socializing the policy of the Government of South Tangerang City. This data was gathered through interviews, observations, and written documentation. The study's findings revealed that policy socialization is progressing very well through various communication channels such as internet media, printed media, and electronic media. The study also demonstrated that this socialization is going quite nicely. These numerous sorts of socialization media were the principal tools used by the South Tangerang regional government to socialize its varied policies. Another way to socialize was to distribute direct media or socialization to each neighborhood. It is advised that the South Tangerang City Government continue to work to improve their performance in socializing policies so that they will achieve the goals of the policies established in order to build a society that is lawful and orderly in relation to the policies that were made.

1. PENDAHULUAN

Studi ini akan fokus pada analisis klaim bahwa komunikasi pemerintah yang efektif memainkan peran kunci dalam keberhasilan menanggapi pandemi Covid-19 melalui penggunaan platform media sosial. Kasus signifikan dari wabah COVID 19 yang telah dimulai pada Maret 2020 di Indonesia. Wabah ini diperparah dengan 156 dari 1.528 orang

yang terinfeksi meninggal selama gelombang pertama. Dengan angka kematian 8,9%, COVID-19 telah menyebar ke sebagian besar provinsi di Indonesia (Irman Firmansyah, 2020). Sekitar 94% provinsi terkonfirmasi terjangkit COVID-19, di mana DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan kasus terkonfirmasi tertinggi (48% dari total kasus) (Irman Firmansyah, 2020).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di masyarakat sekitar Jakarta (Tangerang Selatan, Tangerang,

Bintaro, Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan) pada 24 Maret hingga 3 April 2020, 31% masyarakat menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah. penanganan Covid-19, antara lain: pada kategori cepat, 39% responden menyatakan tindakan sedang, 24% menyatakan lambat, dan 6% menyatakan sangat cepat. Persentase ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu mengambil beberapa langkah strategis tambahan untuk memerangi virus ini. Jumlah 6% dan 31% yang mewakili respon 'sangat cepat' dan 'cepat' belum memberikan dampak positif bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan gerakan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pengerahan potensi masyarakat menjadi unggulan untuk mengatasi Covid-19.

Inisiatif koordinasi dan respons pemerintah yang tidak kooperatif dan terorganisir dengan buruk oleh organisasi-organisasi yang saling bergantung ini telah menyebabkan pandangan dan tanggapan yang bertentangan secara politis antara pejabat pemerintah federal dan negara bagian tentang pandemi (Miller, Colvin, & Superville, 2020; Skidmore, 2016; Subramanian, 2020). Perselisihan internal pemerintah merupakan salah satu penyebab umum kerusuhan sosial dan, di Amerika Serikat, peningkatan permusuhan sosial antara sektor publik dengan arah kebijakan yang berbeda, upaya yang tidak memadai untuk mengurangi risiko kesehatan, dan pencegahan hasil kesehatan yang negatif (sakit, penderitaan, dan kematian) selama krisis COVID-19.. Peran penting pemerintah untuk menyatukan dan memotivasi kelompok masyarakat sangat penting untuk mempromosikan pencegahan, respons, dan pemulihan risiko kesehatan dari kerusakan serius selama keadaan darurat nasional (Kreps et al., 2005; Seeger et al., 2018).

Baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri yang terkait dengan sosialisasi peraturan daerah belum mengatur secara rinci tentang cara efektifitas sosialisasi peraturan daerah serta umpan balik dari proses sosialisasi tersebut, sehingga dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap luasnya penyebaran peraturan daerah baik di tingkat provinsi dan khususnya di kabupaten. Dengan demikian, pemerintah di daerah secara otomatis harus berinisiatif mencari strategi sendiri untuk mensosialisasikan peraturan daerahnya dengan tingkat kegiatan dan proses implementasi yang berbeda.

Untuk memerangi pandemi secara efektif dan melindungi masyarakat dari dampaknya, koordinasi pemerintah yang efektif menjadi penting karena jumlah otoritas yang terlibat dalam penelitian krisis di tingkat nasional (Huang, 2020). Penjangkauan pemerintah yang efektif memainkan

peran penting dalam mengingatkan pemangku kepentingan sipil utama (termasuk responden pertama, populasi berisiko, penyedia layanan kesehatan/otoritas kesehatan, perwakilan media, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum) tentang risiko yang akan segera terjadi dan praktik terbaik untuk mengurangi mereka. Pemangku kepentingan sipil utama ini termasuk responden pertama, populasi berisiko, penyedia layanan kesehatan/otoritas kesehatan, dan masyarakat umum. Kerusakan yang terjadi selama keadaan darurat. Ini termasuk komunikasi di dalam pemerintah itu sendiri, baik di dalam departemen dan antar departemen, serta komunikasi dengan publik, media, dan organisasi lainnya. Ini juga termasuk komunikasi dengan anggota negara lain yang menghadapi risiko kesehatan yang sama. Karena sifat saling berhubungan dari berbagai kelompok dan organisasi ini, kontak pemerintah harus sangat efektif dan terorganisir dengan baik untuk memberikan intelijen dan panduan yang paling membantu yang mungkin untuk respons pandemi yang lebih baik.

Media sosial digunakan untuk komunikasi massa. Twitter sebagai pameran karya Setiap pengguna dapat menunjukkan identitas yang ingin disampaikan pemerintah melalui media sosial di halaman pribadinya. Akibatnya, Twitter dapat dipandang sebagai platform media yang dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan motivasi individu. Twitter adalah salah satu platform media sosial paling populer di kalangan instansi pemerintah. Twitter juga menekankan upaya pembentukan Kementerian Kesehatan RI dalam menangani pandemi dalam penelitian ini.

Menurut Qashmal dan Ahmadi (2015), Twitter dapat dideskripsikan berdasarkan kognitif, integratif, dan integratif sosial. Kehadiran Twitter meningkatkan identitas online yang memungkinkan interaksi yang lebih efektif tidak terbatas pada penggunaan pribadi tetapi juga berfungsi untuk entitas pemerintah terutama sebagai alat untuk keterlibatan publik. Salah satu dampak media sosial yang dijalankan oleh pemerintah dapat membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam skala yang lebih besar dan sebaliknya. Penggunaan media sosial oleh pemerintah sebagai sarana untuk mempromosikan kebijakan atau program pemerintah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Banyak bukti dapat ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait penggunaan media sosial oleh pemerintah.

Studi Rini (2016) memberikan contoh bahwa media sosial dianggap sebagai indikasi kemampuan wirausahawan tersebut dalam menerapkan tata kelola dan pemanfaatan informasi yang baik. Sejalan dengan itu, Effendi et.al (2019)

memaparkan bahwa melalui akun media sosial telah terbukti memberikan manfaat bersama baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Adanya akun pemerintah dalam platform media sosial tertentu membantu masyarakat untuk mempertimbangkan pemikiran, pendapat, dan kebutuhannya. Namun penelitian Badri (2016) menjelaskan bahwa media sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan baik sektor perkotaan maupun pedesaan.

Penggunaan media sosial baik di perkotaan maupun pedesaan telah banyak digunakan oleh sebagian besar kota di Indonesia sebagai alat kampanye. Dengan menggunakan media sosial pemerintah mampu menarik perhatian masyarakat terhadap acara tersebut. Mengingat hal ini, dapat menjadi tantangan untuk menentukan apakah sebuah tweet cocok untuk konsumsi publik atau tidak. Dengan melihat data dari penelitian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa tidak hanya warga biasa tetapi bahkan instansi pemerintah telah mengadopsi penggunaan media sosial. Penelitian sebelumnya telah secara mendalam menjelaskan manfaat memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Selain penduduk kota, hal ini juga berlaku bagi mereka yang berada di tempat yang lebih terpencil. Seperti di Kota Tangerang Selatan di Indonesia, di mana langkah serupa telah dilakukan. Pemerintah Tangerang Selatan bergabung di Twitter pada Februari 2012. Studi ini akan menganalisis kolaborasi yang dilakukan pemerintah Tangerang Selatan dalam menanggapi pandemi Covid-19 melalui akun Twitter-nya (@Kota_Tangerang).

Akun Twitter @Kota_Tangerang memiliki kurang lebih 42.400 pengikut baik perorangan, swasta, maupun instansi pemerintah lainnya. Selama pandemi, akun ini memiliki 1002 tweet. Perubahan lingkungan telah membuat pergeseran penggunaan media sosial. Sebelum pandemi, akun Twitter @Kota_Tangerang hanya menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan publik. Namun, di masa pandemi komunikasi yang diharapkan meluas juga terjadi antara entitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini mencoba menjawab efektivitas akun twitter @Kota_Tangerang sebagai alat komunikasi pemerintah.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi dalam mensosialisasikan kebijakan selama pandemi COVID-19 di Tangerang Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisis data

dideskripsikan dalam bentuk deskriptif. Menurut penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu peristiwa pada objek penelitian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekuensial yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder penelitian ini berupa data dari situs resmi pemerintah, jurnal dan artikel yang telah diidentifikasi sesuai dengan indikator variabel penelitian. Data yang diperoleh peneliti akan diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus sehingga dapat diperoleh hasil penelitian untuk mengetahui sejauh mana kerjasama dalam mensosialisasikan kebijakan terkait COVID-19 di Tangerang Selatan.

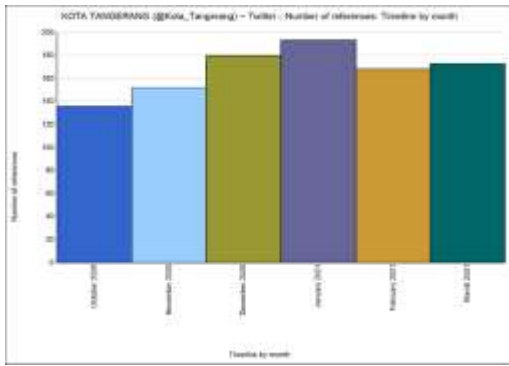
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penanganan wabah Covid-19, diperlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan harus mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Beberapa langkah awal telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain; (1) himbuan kehati-hatian, (2) penerapan protokol kesehatan termasuk 'Germas' (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), (3) social distancing, (4) penyemprotan disinfektan, (5) kecukupan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan, (6) tinggal di rumah atau bekerja dari rumah hingga opsi geofence seperti penutupan sebagian wilayah dan atau penguncian (Irman Firmansyah, 2020). Kebijakan ini dirancang untuk diterapkan oleh semua aktor yang terlibat dalam penanganan COVID-19, termasuk akademisi, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta belum mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menangani COVID-19.

Hal ini dapat dilihat setelah Ater diumumkan ada penderita Covid-19 di Indonesia Maret lalu, ada tanggapan yang mengejutkan dari masyarakat. Respon yang ditunjukkan melalui panic buying sembako, masker, hand sanitizer, dan disinfektan membuat harga barang-barang tersebut menjadi sangat mahal. Kondisi ini membuktikan bahwa suatu negara sebagai pemegang kekuasaan belum mampu mengelola situasi dengan baik. Langkah pemerintah yang kurang cepat dalam mengatasi kondisi ini dikarenakan informasi yang disampaikan mengakibatkan kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penanganan awal COVID-19, yang menyerukan pola hidup

sehat dan social distancing. Data berikut menunjukkan tindakan pemerintah dalam mencegah pandemi COVID-19.

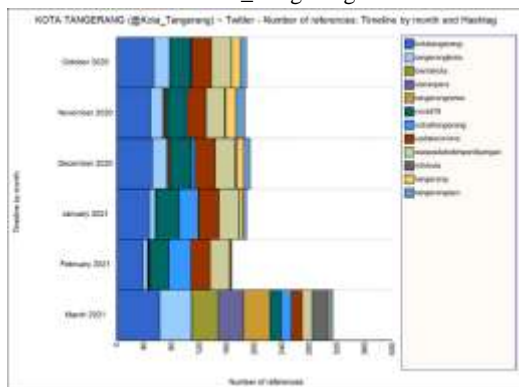
Gambar 1. Jumlah Tweet @Kota_Tangerang Berdasarkan Bulan



Sumber: Hasil Olah Data Melalui NVivo 12 Plus

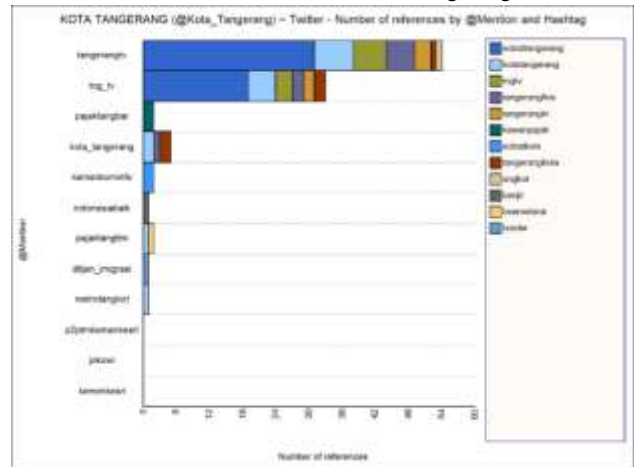
Pemerintah berupaya melakukan beberapa tindakan cepat, antara lain: (1) menerbitkan pedoman kesiapsiagaan melalui Kementerian Kesehatan RI pada 28 Januari 2020; (2) sosialisasi cara pencegahan Covid-19 pada 21 Januari 2020 melalui biro komunikasi dan pengabdian masyarakat Kementerian Kesehatan RI; dan (3) melakukan tindakan pemulangan WNI dalam tiga tahap. Dengan mengevakuasi total 238 WNI di Provinsi Hubei, China. Selain itu, terhadap 188 WNI yang menjadi awak kapal dunia impian di Hong Kong pada 26 Februari 2020, dan 68 WNI di atas awak Diamond Princess pada 1 Maret 2021, (4) pemerintah juga cepat dalam mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia. Pada 17 Juni 2019, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan pencegahan, deteksi, dan penanggulangan wabah penyakit, pandemi global, serta urgensi biologi dan kimia nuklir. Presiden melakukan koordinasi terkait penetapan kebijakan, pendanaan, pembangunan masyarakat, bencana non alam, dan kerjasama melalui instruksi tersebut.

Gambar 2. Frekuensi Penggunaan Hashtag Oleh Akun Twitter @Kota_Tangerang



Sumber: Hasil Olah Data Melalui NVivo 12 Plus

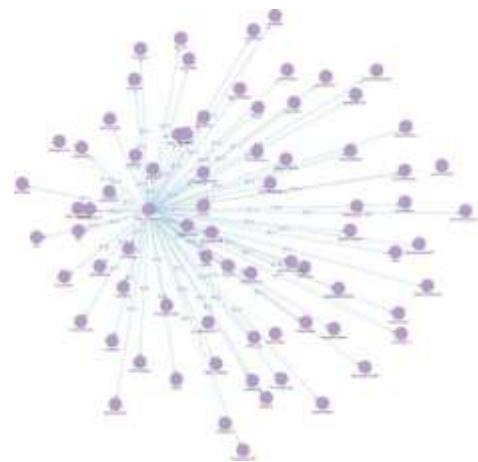
Gambar 3. Frekuensi Penggunaan Hashtag dengan @Mention Oleh Akun Twitter @Kota_Tangerang



Sumber: Hasil Olah Data Melalui NVivo 12 Plus

Berdasarkan hasil olah data dengan Software NVivo 12 Plus, diketahui bahwa hashtag (#) yang paling sering digunakan terkait dengan Pandemi Covid-19 ialah #covid19, #updatecorona, dan #waspadabolehpantikjangan. Dalam penggunaannya, ketiga hashtag tersebut sering ditemui berada dalam satu tweet yang sama. Disisi lain, dalam penggunaan Hashtag tersebut, akun twitter @Kota_Tangerang paling sering berinteraksi dengan akun twitter @sobattangerang, yang mana akun tersebut merupakan akun yang followers-nya di dominasi oleh kalangan generasi muda.

Gambar 4. Sociogram @Kota_Tanggerang



Sumber: Hasil Olah Data Melalui NVivo 12 Plus

Lebih lanjut, analisis sosiogram digunakan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk melihat berbagai jenis hubungan (edges) pada satu jaringan yang memiliki lebih dari satu jenis interaksi (vertes) dalam jaringan. Berdasarkan *degree centrality* akun @Kota_Tangerang (Vertex A), memiliki *degree centrality* 60, dengan sebaran *degree in* 0 dan *degree out* 61. *Degree centrality* adalah jumlah jumlah keterhubungan yang terhubung langsung dengan suatu interkasi. Derajat sering digunakan sebagai ukuran nilai keterhubungan suatu simpul dan

akibatnya, popularitas dan pengaruhnya. Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa dalam penyebaran informasi, akun @Kota_Tangerang berhasil menjangkau dan mempengaruhi akun lain (adanya aktifitas retweet) sebanyak 61 akun dalam menyebarkan informasi terkait dengan sosialisasi kebijakan covid-19.

Adanya interaksi yang komprehensif tentu saja sangat penting dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan bersama tentang masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memungkinkan para pemangku kepentingan ini untuk bekerja sama dan menyepakati solusi. Berdasarkan hasil dari analisis Sosiogram pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa *tweet* akun twitter @Kota_Tangerang tidak hanya mendapat perhatian dari akun pemerintah lainnya saja namun juga informasi yang diberikan telah di *Re-Tweet* berulang kali oleh akun masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai *influencer*, seperti akun @KangSemproel dan @PerjakaGesit.

Influencer terdiri dari pengguna media sosial biasa yang berkembang dengan berbagai mekanisme untuk menumbuhkan popularitas dan pengaruh dalam jaringan sosial (Abidin, 2015). Semakin banyak ilmuwan mengungkapkan bahwa influencer muncul sebagai kekuatan baru dalam membentuk wacana publik dan meningkatkan kesadaran publik akan agenda sosial-politik di ruang publik digital. Fenomena ini dianggap sering mewakili suara minoritas yang terpinggirkan dalam suatu masyarakat karena menyediakan sumber informasi alternatif yang menyaingi media arus utama, serta menumbuhkan lahan subur untuk menyuarakan sikap politik yang reaksioner. Influencer dikenal sebagai aktor pihak ketiga yang memanfaatkan konten yang mereka posting di blog dan platform media sosial untuk membangun pengikut online mereka dan membentuk sikap dan perilaku pengikut melalui interaksi. Proses yang terjadi secara instan dan berkelanjutan melalui penerbitan konten yang berkaitan dengan layanan, ide, dan ideologi berdampak pada pemahaman publik tentang suatu masalah.

Pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh bagaimana pilihan di luar kendali masyarakat umum atau keputusan legislatif berdampak pada dunia. Ketika peristiwa seperti yang dijelaskan di atas terjadi, orang-orang beralih ke media sosial untuk mencari informasi, mengikuti berita terbaru, dan menghilangkan ketakutan mereka dengan menertawakan beberapa meme. Orang-orang juga mengharapkan kepemimpinan dari pemerintah selama masa-masa sulit, jadi masuk akal jika pembuat undang-undang, politisi, dan pemerintah menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengelola komunikasi krisis dan memberikan pembaruan rutin dan resmi kepada warga di seluruh dunia.

4. SIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modal sosial sebagai nilai-nilai masyarakat Indonesia yang masih berkembang dan jaringan yang dibangun menjadi instrumen pendorong utama untuk mensukseskan program pemerintah. Bentuk-bentuk modal sosial yaitu nilai-nilai,

lembaga kemanusiaan, kolaborasi kelas menengah, tokoh masyarakat/influencer/artis, pengusaha, dan media sosial perlu dikelola sebagai aset pemerintah dalam mendorong keberhasilan suatu program. Selain itu, konsep modal sosial dalam bingkai relasi, perilaku, dan kerja sama diusung oleh masyarakat Indonesia secara sukarela dengan tujuan mencegah merebaknya Covid-19 dan mendapatkan bukti otentik dari kasus virus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardelia Devy Pratamita, Peran Humas Dalam Sosialisasi Kebijakan Pemerintah (Studi Peran Humas Dalam Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah (Pp) No. 46/2013 Mengenai Pemberlakuan Pajak Ukm Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Ii Kota Surakarta), Surakarta: 2014.
- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi Dan M. Makmur tahun 2015, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015) Malang. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social Capital and Community Resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan 2010-2017. Online. <https://tangselkota.bps.go.id/dynamictable/2017/05/09/49/jumlah-penduduk-kota-tangerang-selatan-2010-2017.html>. diakses pada bulan Maret 2020.
- Coleman, James S (2011), Dasar-dasar Teori Sosial, Nusa Media, Bandung.
- field, John, (2003), Modal Sosial, Kresasi Wacana, Bantul.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan. Dokumen Resmi Milik Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik. Diakses pada bulan Maret 2020.
- Hacker, Richard, (1990), Pengantar Paling Komprehensif Pemikiran Pierre Bordiue (terjemahan), Jalasutra, Yogyakarta.
- Irman Firmansyah, Bambang Pramudya, & Pipin NoviatiSadikin. (2020). System dynamics of peak projection Covid-19 in Indonesia. *Journal of System Dynamic*. Volume 1 Nomor 1 (June)
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: The role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazards*, 60(2), 761–779. <https://doi.org/10.1007/s11069-011-0016-1>
- Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 19(4), 438–451. <https://doi.org/10.1108/09653561011070367>
- M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018): 883-902 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) Cianjur: 2018.
- Muh Aksan Mubarak Peranan Pemerintah Daerah Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Gowa, Makasar: 2017.
- Saroddin, Peranan Humas Pemda Dalam Mensosialisasikan Informasi Pembangunan Daerah, Makasar: 2017.
- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social Capital and Community Resilience. *American Behavioral Scientist*,

- 59(2), 254–269.
<https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Coleman, James S (2011), *Dasar-dasar Teori Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- field, John, (2003), *Modal Sosial*, Kresasi Wacana, Bantul.
- Hacker, Richard, (1990), *Pengantar Paling Komprehensif Pemikiran Pierre Bordiue* (terjemahan), Jalasutra, Yogyakarta.
- Irman Firmansyah, Bambang Pramudya, & Pipin NoviatiSadikin. (2020). System dynamics of peak projection Covid-19 in Indonesia. *Journal of System Dynamic*. Volume 1 Nomor 1 (June)
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: The role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazards*, 60(2), 761–779. <https://doi.org/10.1007/s11069-011-0016-1>
- Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 19(4), 438–451. <https://doi.org/10.1108/09653561011070367>
- Roosita MD, Devi Utami, Dkk (Center of Human And Economic Development), I. T. dan B. A. D. J. (2020). Hasil Survey Dampak Sosial-Ekonomi, Psikologi- Kesehatan dan Religiusitas Akibat Pandemi Corona VirusDisease 2019 Pada Masyarakat Perkotaan. Jakarta.
- Schellong, A. R. M. (2008). Government 2.0: An exploratory study of social networking services in Japanese local government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 2(4), 225–242. <https://doi.org/10.1108/17506160810917936>
- Vardavas, C. I., & Nikitara, K. (2020). COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. *Tobacco Induced Diseases*, 18(March), 1–4. <https://doi.org/10.18332/tid/119324>